

PEMILIHAN UMUM 2024 DAN WACANA TIGA PERIODE: PERSPEKTIF KOMUNIKASI POLITIK

Harun Ni'am

Dosen Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Wahid Hasyim Semarang
Email : harun_niam@yahoo.com

Abstract

Indonesia will hold general elections in 2024. One of the issues related to the election that is being widely discussed is the three period discourse for President Joko Widodo (Jokowi). The constitution expressly prohibits this discourse. Jokowi has also on several occasions responded to this three-period discourse. However, the discourse has not stopped. One reason why this discourse has not stopped is the problem of political communication by Jokowi. This study uses the theory of Jay G. Blumler and M. Gurevitch which conveys four components in political communication, namely political institutions in the aspect of political communication, media institutions in the aspect of political communication, audience orientation and political cultural relevance.

Keywords: 2024 General Election, Three Period Discourse, Political Communication.

Abstrak

Indonesia akan menyelenggarakan pemilihan umum tahun 2024. Salah satu isu terkait pemilu yang ramai diperbincangkan adalah wacana tiga periode untuk Presiden Joko Widodo (Jokowi). Konstitusi secara tegas melarang wacana ini. Jokowi pun dalam beberapa kali kesempatan merespon wacana tiga periode ini. Namun wacana itu tetap belum berhenti. Salah satu penyebab wacana ini belum berhenti adalah permasalahan komunikasi politik yang dilakukan Jokowi. Penelitian ini menggunakan teori Jay G. Blumler dan M. Gurevitch yang menyampaikan empat komponen dalam komunikasi politik, yaitu institusi-institusi politik dalam aspek komunikasi politik, institusi media dalam aspek komunikasi politik, orientasi khalayak dan relevansi budaya politik.

Kata Kunci : Pemilihan Umum 2024, Wacana Tiga Periode, Komunikasi Politik.

A. PENDAHULUAN

Sebagai negara yang menjalankan prinsip demokrasi, Indonesia akan menyelenggarakan pemilihan umum (pemilu) tahun 2024. Pemilu 2024

- mempunyai nilai penting terutama dalam hal sirkulasi kepemimpinan dan pemantapan konsolidasi demokrasi.¹ Meskipun pemilu masih dua tahun lagi, namun suhu politik sudah mulai menghangat. Berbagai isu menjelang Pemilu 2024 mulai ramai diperbincangkan seperti partai politik peserta, koalisi partai politik, program kerja, kandidat calon presiden dan wakil presiden, politik identitas serta penambahan masa jabatan untuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) berupa wacana tiga periode.

Wacana tiga periode mulai muncul pada periode kedua pemerintahan Jokowi. Usulan perubahan masa jabatan presiden menjadi tiga periode muncul setelah adanya rekomendasi MPR periode 2014-2019 untuk melakukan amendemen UUD 1945. Awalnya, rekomendasi itu hanya terbatas permasalahan Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Namun kemudian melebar ke permasalahan lain, termasuk wacana penambahan periode jabatan presiden menjadi tiga periode.

Dalam perkembangannya, wacana tiga periode muncul tidak hanya sekali, namun beberapa kali. Wacana ini jelas berbenturan dengan nilai demokrasi dan konstitusi. Meskipun demikian, wacana ini tetap dimunculkan oleh sejumlah pihak, mulai dari beberapa pemimpin lembaga negara, jajaran menteri, pemimpin partai politik sampai berbagai relawan pendukung Jokowi. Karena itu, kemunculan wacana tiga periode tentu bukan wacana yang spontan dan berdiri sendiri. Melihat banyaknya pihak yang memunculkan, tidak berlebihan kalau ada penilaian bahwa di balik wacana ini ada perencanaan dan desain politik yang sudah dipersiapkan.

1. Permasalahan

Salah satu kecenderungan orang yang sedang berkuasa adalah melanggengkan dan memperbesar kekuasaan. Sejarah yang terjadi di banyak negara memperlihatkan kecenderungan itu. Tidak menutup kemungkinan Presiden

¹ Robert Dahl, *On Democracy*, (Yale: Yale University Press, 2000), hlm. 199. Lihat juga Guillermo O'Donnell, "Illusion and Consolidation", *Journal of Democracy*, 1999, hlm. 37.

Jokowi juga dihadapkan pada godaan atau keinginan untuk melakukan kecenderungan itu. Relawan pendukung Jokowi yang menginginkan tiga periode juga lumayan banyak. Bahkan seandainya wacana tiga periode gagal, maka masih ada wacana untuk menambah durasi masa pemerintahan beberapa tahun lagi setelah periode kedua Jokowi berakhir serta wacana penundaan pemilu. Semua itu bertujuan untuk menambah atau memperpanjang masa pemerintahan Jokowi.² Padahal demokrasi dan konstitusi hadir untuk membatasi kecenderungan itu sehingga dapat mengurangi dampak negatif dari sebuah kekuasaan yang terlalu lama.

Wacana tiga periode berbenturan dengan nilai demokrasi yang sedang dibangun negara ini. Wacana tiga periode akan membuat demokrasi Indonesia mengalami kemunduran karena demokrasi menegaskan pembatasan periode dalam jabatan politik, terutama presiden. Semakin lama suatu kekuasaan maka kemampuan untuk mengumpulkan berbagai sumber daya menjadi semakin kuat. Dengan begitu, menjadikan kekuasaan menjadi semakin dekat ke status absolut. Konsekuensinya adalah kompetisi politik menjadi tidak seimbang (tidak adil), karena ada satu pihak yang terlalu kuat, dan yang lain berada dalam kondisi lemah.

Selain persoalan demokrasi, wacana tiga periode juga berbenturan dengan konstitusi. Salah satu agenda penting era reformasi adalah melakukan amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Proses amandemen yang berlangsung beberapa tahun (1999-2002) berhasil mengubah berbagai aturan strategis kenegaraan, termasuk semangat membatasi kekuasaan presiden.³ Sebelum UUD 1945 diamandemen, disebutkan bahwa Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan setelahnya dapat dipilih kembali. Hal itu dapat dimaknai jika telah terpilih maka dapat dipilih kembali sampai berkali-kali karena

² <https://nasional.kompas.com/read/2022/02/26/11541431/3-ketum-koalisi-jokowi-bicara-perpanjangan-kekuasaan-3-hari-berturut-> Diakses tanggal 20 September 2022 Jam 13.00.

³ Valina Singka Subekti, *Menyusun Konstitusi Transisi: Pergulatan Kepentingan dan Pemikiran dalam Proses Perubahan UUD 1945*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2008), hal. 7.

tidak adanya pembatasan tentang berapa kali periode seseorang diperbolehkan menjabat. Namun, setelah melalui amandemen, secara tegas disebutkan Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya satu kali masa jabatan. Dengan kata lain, dalam pasal 7 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 hasil amandemen, telah diatur masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden maksimal dua periode.

Meskipun wacana tiga periode berbenturan dengan nilai demokrasi dan konstitusi, namun wacana ini tetap belum berhenti dan beberapa kali kembali dimunculkan ke permukaan. Ada hal menarik dalam melihat wacana tiga periode ini, yaitu komunikasi politik Jokowi dalam merespon wacana tiga periode. Jokowi menegaskan bahwa sejak awal ia sudah menyampaikan bahwa dirinya adalah produk pemilihan langsung berdasarkan UUD 1945 pasca-reformasi.⁴ Berarti ia taat pada pembatasan periode jabatan presiden yang hanya dua periode. Namun respons Jokowi pada kesempatan berikutnya dinilai bersayap dan tidak tegas. Karena itu, dalam perspektif komunikasi politik, respons Jokowi dinilai menjadi sebuah permasalahan tersendiri yang ikut menjadikan wacana ini belum reda. Komunikasi politik Jokowi dinilai juga belum optimal untuk menyelesaikan wacana tiga periode ini.

2. Komunikasi Politik

Komunikasi politik secara garis besar diartikan sebagai penyampaian pesan politik dari komunikator kepada komunikan untuk mencapai tujuan politik yang diinginkan oleh penyampai pesan. Komunikasi politik mempunyai fungsi untuk mengatur perbuatan manusia dalam kondisi konflik serta dalam konsekuensinya. Dalam komunikasi politik ada peran penting komunikator politik seperti aktivis, konsultan, politisi, marketing, profesional dan juru bicara. Selain itu, ada juga

⁴ <https://nasional.kompas.com/read/2022/08/29/10525661/empat-kali-wacana-presiden-3-periode-sikap-jokowi-dulu-dan-kini>. Diakses tanggal 20 September 14.00.

proses persuasi, pesan politik, media politik, khalayak ramai (*audience*) serta akibat yang ditimbulkan dalam proses komunikasi politik tersebut.⁵

Komunikasi politik mempunyai fungsi penting dan menentukan dalam pelaksanaan demokrasi. Di dalamnya terdapat pertarungan kepentingan untuk memengaruhi, merebut, mempertahankan, dan memperluas kekuasaan yang dilakukan oleh para komunikator politik yaitu pihak elit (penguasa) maupun publik (yang dikuasai). Komunikasi politik dalam suatu masyarakat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dinamika politik di mana komunikasi itu bekerja.⁶

Penelitian ini menggunakan teori komunikasi politik Jay G. Blumler dan Michael Gurevitch yang menyampaikan empat komponen dalam komunikasi politik. Pertama, institusi politik dengan aspek-aspek komunikasi politiknya. Kedua, institusi media dengan aspek-aspek komunikasi politiknya. Ketiga, orientasi khalayak terhadap komunikasi politik. Keempat, aspek-aspek komunikasi yang relevan dengan budaya politik.⁷ Semua komponen itu saling berkaitan dan harus dilihat dari konteks yang mengitarinya.

Terdapat dua fenomena komunikasi politik.⁸ Penelitian ini menggunakan pendekatan dalam dua fenomena itu. Pertama, fenomena komunikasi politik dalam sistem politik. Pihak elit yang berada di ranah suprastruktur politik yaitu eksekutif dan legislatif mempunyai fungsi untuk mengolah keputusan-keputusan politik yang berasal dari berbagai aspirasi dan kepentingan yang nantinya dinegosiasikan (diperjuangkan) menjadi produk kebijakan publik. Kebijakan publik tersebut akan diumpan balik ke pihak publik di ranah infrastruktur politik yang terhimpun dalam kesatuan kekuatan massa seperti partai politik, organisasi kemasyarakatan, lembaga

⁵ Jay G. Blumler and Michael Gurevitch, *The Crisis of Public Communication*, (London and New York: Routledge, 1995), hal. 12.

⁶ Asep Saeful Muhtadi, *Komunikasi Politik Indonesia : Dinamika Islam Politik Pasca-Orde Baru*. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008), hal. 9.

⁷ Jay G. Blumler and Michael Gurevitch, *Op. Cit.*, hal. 46.

⁸ Adhi Iman Sulaiman, "Komunikasi Politik Dalam Demokratisasi" dalam *Observasi*, Volume 11 Nomor 2 Tahun 2013, Balai Pengkajian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika, Badan Litbang SDM, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Bandung, hal. 120.

swadaya masyarakat (LSM), media massa, kelompok kepentingan dan kelompok penekan.

Kedua, fenomena komunikasi politik dalam kampanye. Para elit politik yang sedang, sudah, maupun yang belum pernah berada dalam ranah suprastruktur politik (legislatif dan eksekutif), berusaha memengaruhi dan meraih dukungan dari publik dengan berbagai cara melalui strategi kampanye yang didukung serta memanfaatkan kekuatan media massa. Dalam hal ini proses komunikasi sosial atau komunikasi politik didasarkan atas kedua pengaruh yaitu interpersonal dan strategi kampanye seperti yang terlihat dalam media massa.

B. PEMBAHASAN

Indonesia mempunyai pengalaman berharga dalam permasalahan masa jabatan presiden. Ada dua presiden yang memerintah dalam waktu yang relatif lama. Presiden pertama, Soekarno, memimpin Indonesia dalam kurun waktu lama (1945 – 1966), yang di bagian akhir pemerintahannya ada konsep presiden seumur hidup. Soekarno akhirnya turun setelah ada krisis politik sepanjang tahun 1965 – 1966. Presiden kedua, Soeharto, bahkan memerintah lebih lama, yaitu selama 32 tahun (1966 – 1998) dengan pemerintahan yang disebut Orde Baru. Soeharto akhirnya turun karena krisis politik tahun 1998, kemudian muncul era reformasi.

Dalam masa transisi demokrasi pada awal era reformasi, Indonesia dipimpin oleh B. J. Habibie sebagai presiden ketiga dengan pemerintahan yang relatif singkat (1998-1999). Habibie kemudian diganti dengan presiden keempat, KH. Abdurahman Wahid (Gus Dur), yang terpilih dalam rangkaian proses Pemilihan Umum 1999. Saat itu, sesuai dengan konstitusi yang berlaku, Gus Dur terpilih sebagai presiden dalam mekanisme politik di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Sebenarnya Gus Dur dapat menjadi presiden dengan masa pemerintahan yang teratur (5 tahun) sebagaimana tercantum dalam konstitusi UUD 1945 sehingga demokrasi akan mudah terkonsolidasi, setelah melawati masa transisi. Namun di tengah jalan terjadi benturan kepentingan elit politik, sehingga Gus Dur harus turun (2001) dan digantikan Megawati Soekarnoputri. Sebagai presiden kelima, masa

pemerintahan Megawati terbatas karena hanya meneruskan sisa masa pemerintahan Gus Dur, yaitu sampai terselenggaranya proses Pemilihan Umum 2004.

Hasil Pemilihan Presiden 2004 memunculkan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai presiden keenam. Pemilihan Presiden 2004 ini dilaksanakan dengan pemilihan oleh rakyat secara langsung dan tidak lagi melalui mekanisme politik di MPR. Karena itu, SBY merupakan presiden pertama Indonesia yang dipilih langsung oleh rakyat. SBY kemudian terpilih kembali sebagai presiden dalam Pemilihan Presiden 2009 dan berhasil menyelesaikan pemerintahannya selama dua periode pada tahun 2014. SBY tidak bisa ikut serta kembali dalam Pemilihan Presiden 2014 karena konstitusi UUD 1945 hasil amandemen membatasi seseorang hanya dapat menjadi presiden paling banyak dua periode.

Pemilihan Presiden 2014 memunculkan Joko Widodo (Jokowi) sebagai presiden ketujuh Indonesia. Sama seperti SBY, Jokowi kemudian terpilih kembali sebagai presiden dalam pemilihan presiden berikutnya, dalam hal ini Pemilihan Presiden 2019. Sesuai konstitusi, Jokowi hanya dapat menjadi presiden selama dua periode dan itu berarti sampai tahun 2024. Setelah itu Jokowi tidak dapat berkompetisi kembali dalam Pemilihan Presiden 2024. Namun menjelang Pemilihan Presiden 2024, wacana tiga periode jabatan presiden untuk Jokowi terus menggelinding dan melahirkan polemik. Jokowi dalam beberapa kali kesempatan memberikan respons terhadap wacana tiga periode ini, namun wacana itu tetap menggelinding. Hal ini dapat dianalisis dengan teori komunikasi politik Jay G. Blumler dan Michael Gurevitch yang menyampaikan empat komponen dalam komunikasi politik.

1. Institusi Politik

Institusi politik, termasuk lembaga negara dan partai politik, memegang peranan penting dalam sebuah komunikasi politik. Institusi ini bisa memberikan pendidikan politik yang jelas, mencerahkan dan terukur sesuai dengan konstitusi dan peraturan yang berlaku. Dengan legitimasi hukum dan politik yang dimiliki,

institusi ini bisa menjadi rujukan utama masyarakat ketika dihadapkan pada sebuah wacana publik.

Dalam permasalahan wacana tiga periode, komponen institusi politik ini belum bekerja secara optimal. Berbagai respons Jokowi tentang wacana tiga periode juga tidak ditindaklanjuti dengan pencerahan publik dan contoh perilaku politik oleh berbagai lembaga negara dan partai politik. Memang ada pernyataan dari beberapa lembaga negara untuk mencoba menanggapi wacana tiga periode, namun tentu butuh dukungan dari institusi-institusi politik lainnya. Sebagai contoh, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) melalui Staf Khusus Dewan Pengarah Antonius Benny Susetyo menyatakan bahwa wacana presiden tiga periode itu seperti teori komunikasi mencari panggung dan hanya ilusi karena secara konstitusi tidak mungkin sehingga akan mati suri.⁹

Sebaliknya, beberapa pemimpin lembaga negara, partai politik dan jajaran menteri justru memberikan pernyataan untuk mendukung perpanjangan jabatan presiden Jokowi. Beberapa elite partai politik mengusulkan penundaan Pemilu 2024, seperti Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar dan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan. Usul tersebut kemudian berkembang menjadi wacana presiden tiga periode yang didukung oleh beberapa menteri seperti Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan,¹⁰ serta Menteri Investasi Bahlil Lahadalia.¹¹

Bahkan dalam perkembangan selanjutnya, ada beberapa tokoh yang sebelumnya menutup rapat pintu wacana penambahan masa jabatan Presiden Jokowi, kemudian berubah agak longgar, seperti Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo dan Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD)

⁹ <https://bpip.go.id/berita/988/567/nalar-sehat-wacana-presiden-3-periode-sudah-pasti-mati-suri.html>. Diakses 30 Agustus 2022 Jam 14.00.

¹⁰ <https://nasional.kompas.com/read/2022/08/29/10525661/empat-kali-wacana-presiden-3-periode-sikap-jokowi-dulu-dan-kini>. Diakses tanggal 20 September 15.00.

¹¹ <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220920170137-32-850395/bahlil-kembali-bicara-penundaan-pemilu-singgung-perubahan-konstitusi>. Diakses Tanggal 20 September Jam 19.30.

AA La Nyalla Mahmud Mattalitti. Bambang Soesatyo menyinggung tentang perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi karena tingkat kepuasan masyarakat meningkat.¹² Sementara AA La Nyalla Mahmud Mattalitti mengusulkan penundaan pemilu dan penambahan dua tahun masa jabatan Presiden Jokowi. Alasannya adalah dua tahun terakhir kepemimpinan Presiden Joko Widodo hanya dihabiskan untuk menangani pandemi Covid-19. Selain itu, ia menilai pemilu sudah dikuasai kelompok-kelompok tertentu.¹³

Banyaknya tokoh penting yang memberikan pernyataan penambahan masa jabatan Presiden Jokowi tentu melahirkan persoalan yang serius. Mereka bahkan menempati posisi strategis untuk membuat kebijakan tentang penambahan masa jabatan presiden termasuk melalui amandemen konstitusi. Presiden Jokowi terlihat kurang tegas untuk memperingatkan mereka, terutama jajaran menteri yang memang ada di bawah koordinasinya.

2. Institusi Media

Media memberikan peran penting dalam hal terbukanya komunikasi politik, termasuk dalam wacana tiga periode. Media massa maupun berbagai *platform* media sosial memberikan ruang yang cukup dalam wacana tiga periode ini. Media bahkan mencatat kemunculan dan perkembangan wacana tiga periode secara berkesinambungan. Media *mainstream* relatif berimbang dalam memberitakan pemberitaan wacana ini, baik dari kelompok yang mendukung maupun kelompok yang menolak. Sementara beberapa media lainnya cenderung menggunakan pendekatan hitam putih.

Media sosial juga memberikan kontribusi yang sangat besar dalam menyampaikan wacana tiga periode. Berbagai *platform* media sosial ramai

¹² <https://news.detik.com/pemilu/d-6450970/saat-bamsuet-singgung-perpanjangan-jabatan-presiden-jelang-2024>. Diakses Tanggal 10 Desember 2022 Jam 09.00.

¹³ <https://www.republika.co.id/berita/rlr69g436/lanyalla-usul-penundaan-pemiludan-penambahan-dua-tahun-jabatan-presiden>. Diakses Tanggal 10 Desember 2022 Jam 10.00.

membahas permasalahan ini, bahkan tidak jarang bersifat vulgar. Polarisasi politik terlihat dalam pertarungan wacana ini. Tidak jarang muncul pendekatan yang hitam putih juga. Kelompok yang mendukung wacana tiga periode selalu dicitrakan sebagai pendukung Jokowi yang akan melanggar konstitusi. Sementara kelompok yang menolaknya dicitrakan sebagai kelompok penentang Jokowi yang akan melindungi konstitusi. Padahal dalam kenyataannya banyak pihak dalam masyarakat yang mendukung pemerintahan Jokowi, atau yang independen, namun menolak wacana tiga periode.

Permasalahannya adalah meskipun banyak kalangan dengan menggunakan media sudah berusaha memberikan pencerahan tentang permasalahan wacana tiga periode, namun wacana itu masih tetap muncul. Ini berarti bahwa kelompok yang ingin mewujudkan wacana tiga periode juga menggunakan media sebagai corong politik mereka. Media akhirnya menjadi ajang kompetisi politik dalam menyikapi wacana tiga periode.

3. Orientasi Khalayak

Komponen orientasi khalayak (*audience*) ini biasanya memaparkan berbagai alasan yang disampaikan dalam komunikasi politik. Dalam hal wacana tiga periode, pendukung wacana tiga periode menyampaikan beberapa alasan misalnya keberlanjutan program pemerintahan Jokowi, adanya pandemi Covid-19 yang menguras energi pemerintah, kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Jokowi dan lainnya.

Tahun 2021 Presiden Jokowi mengumpulkan para ketua umum partai politik di Istana Kepresidenan. Dalam pertemuan tersebut membahas mengenai pemindahan Ibu Kota Negara (IKN). Dalam pertemuan itu Jokowi memberikan pesan bahwa memindahkan ibu kota tidak cukup hanya dua periode. Masyarakat bisa membaca bahwa secara tersirat Jokowi ingin kembali menjabat dengan periode ketiga, atau mencari pengganti yang mau melanjutkan program besarnya. Jokowi khawatir kalau masa jabatannya dalam periode kedua selesai namun pemindahan

ibu kota belum terwujud, sementara presiden penggantinya belum tentu menyetujui pemindahan IKN.

Para relawan pendukung juga mewacanakan amandemen sebagai pintu masuk menambah periode jabatan presiden untuk Jokowi. Wacana tiga periode dengan UUD yang berlaku sekarang tentu tidak memungkinkan, kecuali mengubahnya dalam proses amandemen, khususnya pasal 7 UUD. Karena itu wacana amandemen juga disuarakan. Amandemen UUD memang bukan hal yang mustahil dilakukan dan bisa terjadi melalui prosedur ketatanegaraan. Namun begitu, amandemen UUD 1945 membutuhkan kajian yang matang dan panjang karena berhubungan dengan kepentingan negara, bukan untuk kepentingan kekuasaan.

Selain itu, melihat konstelasi peta politik sekarang ini sulit untuk melaksanakan prosedur ketatanegaraan tentang amandemen UUD. Secara hitungan matematis, wacana menambah periode jabatan presiden sulit untuk terjadi. Para ketua umum partai politik berkepentingan dalam sirkulasi kepemimpinan dalam kontestasi Pilpres 2024. Sebagian dari mereka bahkan sudah lama melakukan langkah politik dengan berbagai sosialisasi ke masyarakat. Sementara kewenangan amandemen UUD itu ada di tangan partai-partai politik.

4. Relevansi Budaya Politik

Dalam perpektif budaya politik, komunikasi politik di Indonesia sering diwarnai dengan komunikasi menggunakan kode-kode atau simbol-simbol. Beberapa presiden dan elit politik Indonesia sering menggunakan ini, bahkan sudah menjadi tradisi. Dalam tradisi orang Jawa, ada konsep eufemisme (penghalusan) politik dengan kode, simbol dan gestur tertentu yang bisa dibaca masyarakat secara multitafsir. Kode dan simbol itu kadang juga tidak selalu selaras dengan pembacaan masyarakat sehari-hari. Bahkan bisa jadi bertolak belakang. Di satu sisi menolak namun di sisi lainnya menerima. Karena itu, menganggukan kepala belum tentu setuju dan menggelengkan kepala belum tentu tidak.

Sebagai orang Jawa, Presiden Jokowi juga sudah lama sering melakukan komunikasi politik seperti ini. Dalam komunikasi politik ini, Jokowi tidak mungkin mengungkapkannya ke publik, Beberapa kali Jokowi memberikan respons yang berbeda-beda ketika wacana tiga periode muncul. Respons Jokowi itu dinilai bersayap dan tidak tegas, bahkan dianggap menikmati wacana perpanjangan masa jabatan presiden.

Tabel Respon Jokowi terhadap Wacana Tiga Periode

Waktu	Konteks Politik	Kutipan Respons Jokowi
2 Desember 2019.	Permulaan munculnya wacana tiga periode	“Kalau ada yang usulkan itu (wacana tiga periode), ada tiga (motif) menurut saya, ingin menampar muka saya, ingin cari muka, atau ingin menjerumuskan. Itu saja”.
15 Maret 2021	Mantan Ketua MPR Amien Rais menyebut bahwa ada skenario mengubah ketentuan dalam UUD 1945 soal masa jabatan presiden.	“Saya tegaskan, saya tidak ada niat. Tidak ada juga berminat menjadi presiden tiga periode”.
4 Maret 2022	Beberapa tokoh memunculkan kembali penundaan pemilu dan wacana tiga periode, seperti Muhaimin Iskandar (PKB), Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan. Airlangga Hartarto (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian) dan Luhut Binsar Pandjaitan (Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi).	“Siapa pun boleh-boleh saja mengusulkan wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden, menteri atau partai politik, karena ini kan demokrasi. Bebas aja berpendapat. Tetapi, kalau sudah pada pelaksanaan semuanya harus tunduk dan taat pada konstitusi”.
5 April 2022	Jokowi menyentil Menteri dalam Sidang Kabinet	“Jangan sampai ada lagi yang menyuarakan lagi mengenai urusan penundaan, urusan perpanjangan, nggak”.
23 Agustus 2022	Wawancara Karni Ilyas dengan Jokowi menyinggung para relawan yang terus mendorong wacana tiga periode.	“Ya kalau menurut saya boleh-boleh sajalah. Itu kan juga sebuah bentuk demokrasi. Dan tatarannya kan baru tataran wacana, kan orang kan boleh juga menyampaikan Jokowi mundur kan juga boleh. Ganti presiden kan juga boleh..yang paling penting jangan anarkis,”

Sumber: Diolah dari pemberitaan beberapa media massa 2019-2022

C. KESIMPULAN

Wacana tiga periode menjelang Pemilihan Umum 2024 beberapa kali dimunculkan oleh sejumlah pihak, mulai dari beberapa pemimpin lembaga negara, jajaran menteri, pemimpin partai politik sampai berbagai relawan pendukung Jokowi. Karena itu, kemunculan wacana tiga periode tentu bukan wacana yang spontan dan berdiri sendiri. Melihat banyaknya pihak yang memunculkan, tidak berlebihan kalau ada penilaian bahwa di balik wacana ini ada perencanaan dan desain politik yang sudah dipersiapkan.

Dalam analisa menggunakan teori komunikasi Jay G. Blumler dan Michael Gurevitch, komunikasi politik dalam menyikapi wacana tiga periode dinilai belum optimal dan berpengaruh terhadap demokrasi Indonesia. Ini menjadi permasalahan karena Indonesia sebagai negara yang menjalankan nilai demokrasi tentu membuka ruang wacana publik dengan komunikasi politik di dalamnya. Wacana publik penting untuk menjaga saluran aspirasi masyarakat yang ujungnya juga akan memperkuat demokrasi. Sementara itu wacana tiga periode dinilai berbenturan dengan nilai demokrasi yang sedang dibangun negara ini. Wacana tiga periode akan membuat demokrasi Indonesia mengalami kemunduran karena demokrasi menegaskan pembatasan periode dalam jabatan politik, terutama presiden. Karena itulah, wacana tiga periode ini harus disikapi secara tegas.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Blumler, Jay G. and Michael Gurevitch, *The Crisis of Public Communication*, (London and New York: Routledge, 1995).
- Dahl, Robert, *On Democracy*, (Yale: Yale University Press, 2000)
- Muhtadi, Asep Saeful, *Komunikasi Politik Indonesia : Dinamika Islam Politik Pasca-Orde Baru*. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008).
- Subekti, Valina Singka, *Menyusun Konstitusi Transisi: Pergulatan Kepentingan dan Pemikiran dalam Proses Perubahan UUD 1945*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2008).

Jurnal

- O'Donnell, Guillermo, "Illusion and Consolidation", *Journal of Democracy*, 1999.
- Sulaiman, Adhi Iman, "Komunikasi Politik Dalam Demokratisasi" dalam *Observasi*, Volume 11 Nomor 2 Tahun 2013, Balai Pengkajian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika, Badan Litbang SDM, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Bandung.

Media Massa

- <https://nasional.kompas.com/read/2022/02/26/11541431/3-ketum-koalisi-jokowi-bicara-perpanjangan-kekuasaan-3-hari-berturut>- Diakses tanggal 20 September 2022 Jam 13.00.
- <https://nasional.kompas.com/read/2022/08/29/10525661/empat-kali-wacana-presiden-3-periode-sikap-jokowi-dulu-dan-kini>. Diakses tanggal 20 September 14.00.
- <https://bpip.go.id/berita/988/567/nalar-sehat-wacana-presiden-3-periode-sudah-pasti-mati-suri.html>. Diakses 30 Agustus 2022 Jam 14.00.

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220920170137-32-850395/bahlil-kembali-bicara-penundaan-pemilu-singgung-perubahan-konstitusi>.
Diakses Tanggal 20 September Jam 19.30.

<https://news.detik.com/pemilu/d-6450970/saat-bamsoet-singgung-perpanjangan-jabatan-presiden-jelang-2024>. Diakses Tanggal 10 Desember 2022 Jam 09.00.

<https://www.republika.co.id/berita/rlr69g436/lanyalla-usul-penundaan-pemiludan-penambahan-dua-tahun-jabatan-presiden>. Diakses Tanggal 10 Desember 2022 Jam 10.00.